Peran Humas dalam Mencegah Kasus Pelecehan Seksual di Perguruan Tinggi Bangka Belitung

Sekar Putri

Sekarputriiainsasbabel@gmail.com

Institut Agama Islam Negeri Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung

Yera Yulista

Yerabelajar@gmail.com

Institut Agama Islam Negeri Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung

Abstract

This study examines the role of public relations (PR) in higher education institutions in Bangka Belitung using Dozier and Broom's role theory. It focuses on PR's involvement in preventing and managing sexual harassment, maintaining institutional image, and handling crises. Findings show varied PR roles across campuses: institutions without formal PR units limit functions to technical and facilitation tasks; STIKES Citra Delima and STIE IBEK perform moderately; STIE Pertiba integrates strategic roles; and Polman Negeri Bangka Belitung demonstrates the most comprehensive model, covering all role spectrums. The study concludes that PR effectiveness depends on institutional structure, policy support, and leadership recognition of PR as a strategic partner.

Keywords: Public Relations Roles, Crisis Communication, Sexual Harassment, Higher Education,

Abstrak

Penelitian ini mengkaji peran humas di perguruan tinggi di Bangka Belitung dengan menggunakan teori peran humas Dozier dan Broom. Fokus penelitian terletak pada keterlibatan humas dalam pencegahan dan penanganan kasus pelecehan seksual, pemeliharaan citra institusi, serta pengelolaan komunikasi krisis. Temuan menunjukkan variasi peran humas di setiap lembaga: perguruan tinggi tanpa unit humas formal masih membatasi fungsi pada ranah teknis dan fasilitasi; STIKES Citra Delima dan STIE IBEK menunjukkan peran menengah; STIE Pertiba sudah mengintegrasikan peran strategis; sedangkan Polman Negeri Bangka Belitung menampilkan model paling komprehensif dengan

mencakup seluruh spektrum peran humas. Penelitian ini menyimpulkan bahwa efektivitas peran humas sangat dipengaruhi oleh struktur kelembagaan, dukungan kebijakan, serta pengakuan pimpinan terhadap humas sebagai mitra strategis.

Kata kunci : Peran Humas, Komunikasi Krisis, Kekerasan seksual, Perguruan Tinggi

A. Pendahuluan

Pelecehan seksual di perguruan tinggi adalah masalah besar yang memiliki konsekuensi hukum dan etika serta berdampak negatif pada reputasi dan image institusi pendidikan tinggi. Kampus harus menjadi tempat yang aman, inklusif, dan mendukung pertumbuhan intelektual dan psikologis semua siswa. Namun, kasus pelecehan seksual yang terjadi di universitas di Indonesia dan di luar negeri telah menjadi lebih jelas bagi masyarakat umum dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini tidak hanya menyebabkan trauma bagi korban, tetapi juga mengguncang kepercayaan masyarakat terhadap institusi pendidikan tinggi sebagai tempat yang seharusnya melindungi hak asasi manusia dan prinsip moral.

Pencegahan jauh lebih penting daripada hanya penanganan, dan humas memiliki posisi strategis dalam membangun kesadaran publik internal (mahasiswa, dosen, staf). Upaya pencegahan melalui komunikasi publik yang efektif menjadi kunci agar kampus mampu menciptakan lingkungan yang aman dan berbudaya anti-kekerasan. Dalam konteks ini, peran humas menjadi krusial karena berfungsi sebagai jembatan informasi dan pembentuk opini publik internal.

Dalam situasi seperti ini, humas, atau hubungan masyarakat, yang merupakan komponen penting dari struktur perguruan tinggi, memiliki peran strategis dalam menangani krisis, termasuk kasus pelecehan seksual. Humas membentuk citra institusi, membangun kepercayaan, dan menjaga reputasi perguruan tinggi; mereka juga bertanggung jawab atas penyebaran informasi kepada publik. Humas menghadapi tantangan untuk menyeimbangkan antara memberi tahu publik tentang kasus pelecehan seksual dan melindungi korban, proses hukum, dan reputasi institusi. Namun demikian, dalam praktiknya, peran humas dalam menangani isu sensitif seperti pelecehan seksual sering kali belum optimal. Humas seringkali mengambil tindakan defensif, yang menunjukkan bahwa institusi lebih peduli dengan reputasi daripada keadilan bagi korban. Dalam hal ini peran

humas sangat penting untuk membantu menjalankan program kerja dan mempertahankan citra lembaga sehingga dikenal dan dipercaya publik¹.

Sebagai institusi pendidikan tinggi, perguruan tinggi memiliki tanggung jawab sosial untuk memastikan bahwa semua siswa dilindungi dari kekerasan dan pelecehan seksual. Permendikbudristek No. 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi adalah bukti lebih lanjut dari perhatian pemerintah Indonesia terhadap masalah ini. Menurut undang-undang, institusi pendidikan tinggi wajib membentuk Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS), serta sistem komunikasi yang efektif untuk menghentikan dan menangani kasus kekerasan seksual.

Fenomena di lapangan menunjukkan peran humas di perguruan tinggi Indonesia masih sangat beragam. Beberapa perguruan tinggi hanya menggunakan humas untuk promosi dan publikasi, sehingga kurang terlibat dalam masalah strategis seperti pencegahan pelecehan seksual. Di sisi lain, ada perguruan tinggi yang mulai memasukkan humas ke dalam proses pengambilan kebijakan, terutama yang berkaitan dengan komunikasi krisis dan perlindungan sivitas akademika. Variasi ini menimbulkan pertanyaan penting: sejauh mana humas perguruan tinggi mampu mencegah pelecehan seksual?

Di tingkat lokal, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menjadi ruang kajian yang menarik. Wilayah ini memiliki sejumlah perguruan tinggi negeri maupun swasta dengan latar belakang kelembagaan yang beragam. Beberapa kampus sudah menghadapi kasus pelecehan seksual dan meresponsnya dengan pembentukan Satgas PPKS, sementara sebagian besar masih berada pada tahap preventif tanpa pengalaman langsung menangani kasus. Kondisi ini membuka peluang untuk meneliti variasi peran humas di masing-masing institusi: apakah humas hanya berfungsi teknis atau sudah berperan strategis dalam konteks pencegahan pelecehan seksual.

Selain itu, penelitian ini juga penting karena humas memiliki posisi strategis dalam menjaga citra institusi. Kasus pelecehan seksual yang tidak ditangani dengan baik berpotensi merusak reputasi perguruan tinggi, menurunkan kepercayaan publik, bahkan memengaruhi

¹ Kurnia Setiyo Rini, Sugeng Rusmiwari, and Herru Prasetya Widodo, "Peran Humas Dalam Meningkatkan Citra Universitas Tribhuwana Tunggaladewi," *JISIP: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik* 6, no. 1 (2017): 34–37, www.publikasi.unitri.ac.id.

daya tarik mahasiswa baru. Oleh karena itu, keterlibatan humas dalam mencegah isu pelecehan seksual bukan hanya terkait aspek moral dan sosial, tetapi juga menyangkut kepentingan keberlanjutan organisasi.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini memiliki urgensi tinggi untuk menggali dan menganalisis bagaimana peran humas perguruan tinggi di Bangka Belitung dalam mencegah isu pelecehan seksual. Penelitian dilakukan dengan teknik wawancara bersama para humas di Perguruan Tinggi Bangka Belitung dengan menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan teori peran humas dalam konteks pendidikan tinggi di Indonesia sekaligus menawarkan rekomendasi praktis bagi perguruan tinggi untuk memperkuat fungsi humas sebagai garda depan komunikasi strategis dan perlindungan sivitas akademika.

B. Peran Humas

Saat ini, *Public Relations* (PR) tidak lagi hanya dipahami sebagai sekadar gambaran dari berbagai jenis hubungan yang sudah ada, melainkan merupakan praktik yang berfokus pada pengelolaan, pemeliharaan, serta peningkatan kualitas hubungan tersebut. Hasil dari aktivitas PR biasanya disebut sebagai citra (*image*). Citra organisasi memiliki peran yang sangat penting karena menjadi faktor utama dalam memperoleh dukungan publik, khususnya untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan. Secara sederhana, citra dapat dimaknai sebagai persepsi atau gambaran yang dimiliki masyarakat maupun pihak internal organisasi terhadap organisasi itu sendiri²

Public Relations atau yang biasa disebut Humas menurut Cutlip-Center-Broom dalam fungsi komunikasi yakni melaksanakan kegiatan komunikasi antara lembaga tempat ia bekerja dengan pihak publik atau khalayak yang menjadi sasarannya³. Menurut Cutlip-Center-Broom dalam Morissan⁴ humas merupakan usaha terencana untuk mempengaruhi pandangan melalui karakter yang baik serta tindakan yang bertanggungjawab didasarkan atas komunikasi dua arah yang saling memuaskan.

² L. R. WEEKES, *Professional Public Relations.*, *Journal of the National Medical Association*, vol. 46, 1954.

³ Cutlip, Center, dan Glenn M. Broom, *Effective Public Relations*, n.d.

⁴ Morissan, *Manajemen Public Relations: Strategi Menjadi Humas Profesional* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008).

Menurut Dozier dan Broom dalam Morissan⁵, terdapat beberapa peran humas yaitu Teknisi Komunikasi (*Communication Technician*), penasehat ahli (*Expert Prescriber*), fasilitator komunikasi (*Communication Facilitator*), fasilitator pemecahan masalah (*Problem-Solving Facilitator*).

1. Teknisi Komunikasi (*Communication Technician*)

Dalam perspektif Dozier dan Broom⁶, peran teknisi komunikasi dipahami sebagai posisi humas yang berfokus pada penyediaan layanan teknis dalam praktik kehumasan. Peran ini menempatkan praktisi humas lebih sebagai pelaksana tugas ketimbang pengambil keputusan strategis. Fungsi teknisi komunikasi seringkali identik dengan komunikasi internal organisasi, di mana humas berperan mengelola penyusunan pesan, penyebaran informasi, serta memastikan bahwa arus komunikasi dapat berjalan sesuai kebutuhan manajemen.

Sistem komunikasi internal dalam organisasi pada dasarnya sangat dipengaruhi oleh struktur, hierarki, serta pola hubungan antarbagian. Karena itu, bentuk dan alat komunikasi yang digunakan tidak selalu seragam; ia dapat berbeda antara tingkatan manajemen dengan karyawan di level bawah, maupun sebaliknya. Variasi tersebut mencerminkan adanya perbedaan kebutuhan dan konteks dalam setiap lapisan organisasi. Misalnya, komunikasi yang dilakukan antara pimpinan dan bawahan lebih menekankan pada instruksi dan pengawasan, sementara komunikasi dari bawahan kepada atasan sering berupa laporan atau penyampaian aspirasi.

Hal serupa juga berlaku dalam interaksi horizontal, yakni komunikasi antara unit satu dengan unit lainnya atau antarbagian di dalam organisasi. Pada konteks ini, teknisi komunikasi bertugas memastikan kelancaran pertukaran informasi lintas departemen, sehingga koordinasi dan kolaborasi dapat berjalan efektif. Dengan demikian, teknisi komunikasi memiliki kontribusi penting dalam menjaga konsistensi alur informasi, meskipun perannya masih bersifat operasional dan belum menyentuh aspek pengambilan keputusan strategis.

⁵ Morissan.

⁶ David M. Dozier dan Glen M. Broom, "Evolution of the Manager Role in Public Relations Practice," *Journal of Public Relations Research* 7, no. 1 (1995): 3-26, https://doi.org/10.1207/s1532754xjpr0701_02.

Dalam konteks perguruan tinggi, peran ini dapat terlihat jelas pada aktivitas keseharian unit humas kampus. Misalnya, humas bertanggung jawab membuat dan menyebarkan siaran pers terkait kegiatan akademik, seperti wisuda, seminar nasional, atau kerja sama dengan institusi lain. Selain itu, humas juga mengelola media sosial resmi kampus untuk menyebarkan informasi terkini, mendesain konten visual promosi penerimaan mahasiswa baru, serta mendokumentasikan kegiatan kampus dalam bentuk foto atau video.

Peran teknisi komunikasi di perguruan tinggi juga mencakup penyusunan buletin atau majalah kampus, mengelola website resmi, hingga membuat laporan dokumentasi kegiatan untuk arsip institusi. Dalam situasi tertentu, humas sebagai teknisi komunikasi juga ditugaskan menyusun naskah pidato rektor, moderator acara, atau menyiapkan materi promosi kampus.

Meski peran ini tampak sederhana, keberadaannya sangat vital dalam menjaga kelancaran arus informasi dan citra positif perguruan tinggi di mata publik. Namun, keterbatasannya terletak pada minimnya keterlibatan humas dalam proses pengambilan keputusan strategis. Humas hanya menjalankan instruksi tanpa memiliki ruang besar untuk memberikan masukan dalam penyusunan kebijakan komunikasi.

Dengan demikian, di lingkungan perguruan tinggi, Teknisi Komunikasi adalah fondasi penting yang memastikan seluruh pesan organisasi tersampaikan secara konsisten dan menarik kepada audiens, meskipun perannya masih berada pada level teknis dan belum strategis.

2. Penasehat Ahli (*Expert Prescriber*)

Peran Penasihat Ahli (*Expert Prescriber*) dalam kehumasan merujuk pada posisi di mana praktisi humas berfungsi sebagai sumber otoritatif dalam merumuskan solusi atas persoalan komunikasi organisasi. Seorang praktisi humas yang memiliki pengalaman dan kompetensi tinggi dipercaya untuk memberikan arahan strategis yang dapat membantu manajemen dalam mengidentifikasi, menganalisis, sekaligus menyelesaikan masalah yang dihadapi organisasi. Relasi antara humas dan manajemen dalam konteks ini sering dianalogikan seperti hubungan antara dokter

dan pasien. Humas sebagai “dokter” berperan aktif memberikan diagnosis atas permasalahan komunikasi, kemudian menawarkan resep berupa strategi dan rekomendasi yang tepat. Sementara itu, pihak manajemen berposisi seperti pasien, yang cenderung pasif, menerima, serta mempercayai usulan dari praktisi humas sebagai langkah penyelesaian masalah. Model hubungan ini menunjukkan adanya ketergantungan organisasi pada kapasitas profesional humas untuk mengelola isu maupun krisis komunikasi. Namun, posisi ini sekaligus menggambarkan terbatasnya partisipasi manajemen dalam proses pengambilan keputusan komunikasi, sebab keputusan lebih didasarkan pada keahlian dan otoritas praktisi humas. Dengan demikian, peran Penasihat Ahli menegaskan pentingnya kehadiran humas yang kompeten, karena keberhasilan organisasi dalam mengatasi permasalahan komunikasi sangat dipengaruhi oleh kualitas rekomendasi yang diberikan.

Dalam konteks perguruan tinggi, peran ini sangat signifikan ketika kampus menghadapi isu yang berpotensi mengganggu reputasi institusi. Misalnya, ketika muncul tuduhan kasus kekerasan seksual di lingkungan kampus, isu intoleransi, atau konflik internal antara mahasiswa dan dosen, humas sebagai penasehat ahli diharapkan hadir memberikan rekomendasi profesional tentang bagaimana pihak rektorat atau pimpinan universitas harus merespons. Praktisi humas akan menganalisis isu, memprediksi dampak reputasional, serta menyusun langkah-langkah komunikasi krisis yang sesuai dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan etika akademik.

Selain itu, humas dalam peran ini juga dapat menyarankan kebijakan komunikasi jangka panjang, seperti pembentukan unit layanan pengaduan, penyusunan standar komunikasi krisis, hingga pelatihan komunikasi publik bagi pejabat kampus. Dengan keahliannya, humas membantu pimpinan perguruan tinggi menjaga citra positif sekaligus melindungi kepercayaan publik, baik dari kalangan mahasiswa, orang tua, alumni, maupun masyarakat luas.

Dengan demikian, di perguruan tinggi, Penasehat Ahli tidak hanya bertugas memadamkan krisis komunikasi yang muncul, tetapi juga memastikan bahwa setiap kebijakan komunikasi organisasi berpijak pada strategi yang tepat, profesional, dan sesuai dengan nilai-nilai akademik yang dijunjung tinggi oleh institusi pendidikan.

3. Fasilitator Komunikasi (*Communication Facilitator*)

Dalam kerangka teori peran humas yang dikemukakan oleh Dozier dan Broom⁷, fasilitator komunikasi (*communication facilitator*) menempati posisi penting sebagai jembatan antara organisasi dan publiknya. Pada peran ini, praktisi humas berfungsi sebagai penghubung yang memastikan adanya arus komunikasi dua arah yang sehat, terbuka, dan seimbang. Humas tidak sekadar menyampaikan informasi dari organisasi ke publik, tetapi juga mendengar, menampung, dan menyampaikan kembali aspirasi, keluhan, atau masukan publik kepada manajemen.

Fasilitator komunikasi pada dasarnya berperan sebagai mediator yang menjaga agar tidak terjadi kesalahpahaman antara organisasi dan publik. Tugasnya adalah membangun saluran komunikasi yang efektif sehingga kebutuhan, kepentingan, dan harapan publik dapat dipahami dengan baik oleh organisasi, sementara kebijakan dan keputusan organisasi dapat diterima secara jelas oleh publik. Dengan demikian, humas berperan menumbuhkan iklim komunikasi yang transparan dan dialogis, bukan hanya monologis.

Dalam praktiknya, humas sebagai fasilitator komunikasi kerap bertindak seperti penerjemah yang menjelaskan perspektif organisasi kepada publik, sekaligus menyuarakan opini publik ke dalam ruang manajemen. Peran ini menuntut keterampilan interpersonal yang baik, kemampuan mendengarkan secara aktif, serta kepekaan terhadap dinamika sosial yang memengaruhi hubungan organisasi dengan lingkungannya.

Dalam konteks perguruan tinggi, misalnya, fasilitator komunikasi sangat penting ketika kampus menghadapi isu-isu publik, seperti kebijakan baru yang menimbulkan pro dan kontra di kalangan mahasiswa, dosen, atau masyarakat. Humas berperan memfasilitasi forum diskusi, membuka kanal komunikasi digital, atau menyelenggarakan dialog publik, agar tercipta hubungan yang harmonis dan saling memahami antara pihak kampus dengan para pemangku kepentingan.

⁷ Dozier and Broom.

Dengan demikian, peran fasilitator komunikasi menegaskan bahwa humas bukan hanya pelaksana teknis komunikasi, tetapi juga penjaga harmoni komunikasi antara organisasi dan publiknya. Keberhasilan organisasi dalam membangun kepercayaan publik sebagian besar ditentukan oleh sejauh mana humas mampu menjalankan peran ini secara profesional.

4. Fasilitator Pemecahan Masalah (*Problem-Solving Facilitator*)

Peran Fasilitator Pemecahan Masalah dalam kehumasan dipahami sebagai keterlibatan langsung praktisi humas dalam struktur manajemen strategis organisasi. Pada posisi ini, humas tidak sekadar menjalankan fungsi teknis penyampaian pesan, melainkan berperan aktif sebagai mitra sejajar dalam proses pengambilan keputusan. Praktisi humas diharapkan mampu menghadirkan perspektif komunikasi yang profesional untuk membantu pimpinan organisasi memahami, merumuskan, sekaligus menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan citra, reputasi, maupun kepercayaan publik.

Keterlibatan humas sebagai fasilitator pemecahan masalah menuntut keahlian analitis, kemampuan membaca dinamika publik, serta kecakapan memberikan rekomendasi yang berbasis data dan pertimbangan etis. Dengan demikian, humas tidak hanya menyarankan alternatif solusi, tetapi juga mendampingi pimpinan dalam menimbang konsekuensi dari setiap keputusan yang diambil, terutama dalam menghadapi krisis yang sensitif. Orientasi peran ini adalah memastikan bahwa keputusan organisasi tidak hanya efektif secara manajerial, tetapi juga dapat diterima secara wajar oleh publik dan dijalankan sesuai standar profesionalisme komunikasi. Dalam konteks perguruan tinggi, peran ini menjadi sangat relevan terutama ketika kampus menghadapi isu-isu kompleks, misalnya terkait kasus kekerasan seksual, konflik internal, atau dinamika hubungan dengan masyarakat sekitar. Humas yang berperan sebagai fasilitator pemecahan masalah harus mampu memberikan masukan strategis kepada rektorat atau biro kemahasiswaan, sehingga langkah yang ditempuh tidak sekadar reaktif, tetapi juga mengandung nilai edukatif, preventif, dan menjaga reputasi institusi. Dengan demikian, humas benar-benar berfungsi sebagai mitra strategis yang memperkuat ketahanan organisasi dalam menghadapi tantangan komunikasi.

C. Humas Perguruan Tinggi

Perguruan tinggi saat ini tidak lagi sekadar dipandang sebagai lembaga non-profit yang hanya berfokus pada bidang keilmuan dan proses *transfer of knowledge*. Lebih dari itu, perguruan tinggi juga berfungsi layaknya institusi profit dengan menjadikan ilmu sebagai komoditas yang ditawarkan. Dalam konteks ini, citra perguruan tinggi menjadi aspek krusial yang memengaruhi pertimbangan calon mahasiswa atau konsumen ketika menentukan pilihan institusi pendidikan yang akan mereka masuki⁸.

Meskipun posisi humas di perguruan tinggi tidak dipandang sebagai yang paling utama, perannya kini semakin diakui penting, khususnya dalam membangun relasi dan membentuk citra positif institusi. Saat ini, hampir seluruh perguruan tinggi berlomba-lomba menunjukkan eksistensinya dengan menonjolkan berbagai keunggulan yang dimiliki demi meningkatkan daya saing dan nilai tawar di mata masyarakat⁹. Perannya pada lembaga pendidikan di era revolusi industri 4.0 kini menjadi elemen penting yang tidak bisa dipisahkan dari upaya mewujudkan tata kelola pendidikan yang berkualitas. Kehadiran lembaga-lembaga pendidikan baru di tengah masyarakat menimbulkan tantangan tersendiri, terutama dalam hal promosi baik di lingkungan sekitar maupun di luar wilayah tersebut. Kondisi ini juga dapat menjadi ancaman bagi lembaga pendidikan yang lebih lama berdiri dan berlokasi berdekatan. Oleh karena itu, humas dituntut untuk mampu menjalankan fungsinya secara profesional, baik dalam aspek teknis maupun dalam mengelola hubungan dengan masyarakat. Dari sisi teknis, humas berperan menjalankan keterampilan kehumasan, seperti menulis, mengambil dokumentasi, mengedit, memberi pernyataan, menyelenggarakan kegiatan khusus, berkomunikasi dengan media, hingga mengelola produksi komunikasi. Keahlian-keahlian tersebut sangat diperlukan bagi individu yang bertanggung jawab agar pesan yang disampaikan benar-benar sampai, dipahami masyarakat, serta menumbuhkan citra positif di mata publik maupun orang tua peserta didik¹⁰, Karena *Public Relations* (PR) memiliki peranan strategis sebagai mata dan telinga bagi manajemen puncak dalam suatu organisasi atau lembaga. Fungsi ini menempatkan PR

⁸ Aktualisasi Nuansa dan Ilmu Dakwah, "Peran Dan Strategi Humas dalam Pembentukan Citra Perguruan Tinggi Islam" 15 (2016): 317-38.

⁹ Nuansa and Dakwah.

¹⁰ Moh Hasan Afini Maulana, *Manajemen Humas pada Lembaga Pendidikan Pesantren, ITQAN : Jurnal Ilmu-Ilmu Kependidikan*, vol. 10, 2019, <https://doi.org/10.47766/itqan.v10i1.282>.

tidak hanya sebagai pihak yang menyampaikan informasi, tetapi juga sebagai pengumpul, pengolah, dan penyampai umpan balik yang berharga dari berbagai pihak, baik internal maupun eksternal¹¹. Peran strategis humas memiliki signifikansi besar dalam membentuk citra positif serta reputasi perguruan tinggi di tengah kompetisi yang kian intens. Melalui pengelolaan komunikasi yang efektif, humas dapat memperkuat daya saing institusi sekaligus membangun dan memperluas jaringan kemitraan dengan berbagai pemangku kepentingan, baik internal maupun eksternal¹².

D. Peran Humas Perguruan Tinggi Bangka Belitung dalam Mencegah Kasus

Pelecehan Seksual

1. ISB Atma Luhur

Pada bagian hasil penelitian ini, penulis ingin menegaskan bahwa peran Humas di perguruan tinggi memiliki posisi yang sangat penting dalam menjaga citra institusi sekaligus membangun komunikasi yang sehat dengan publik internal maupun eksternal. Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa fungsi tersebut tidak selalu dijalankan secara optimal, terutama dalam isu-isu sensitif seperti kasus pelecehan seksual.

Temuan penelitian pada ISB Atma Luhur memberikan gambaran nyata bagaimana peran Humas lebih banyak difokuskan pada aspek teknis atau *communication technician*, yaitu menyebarkan informasi seputar aturan kampus, mempublikasikan kegiatan melalui media sosial, serta memfasilitasi komunikasi internal lewat grup WhatsApp. Sementara itu, fungsi strategis Humas sebagai *expert prescriber* yang mampu merumuskan kebijakan, maupun sebagai *problem solving facilitator* yang terlibat dalam penyelesaian persoalan krisis, belum terlihat menonjol. Hal ini dapat dimaklumi karena hingga saat penelitian dilakukan, kampus belum menghadapi kasus pelecehan seksual secara langsung, sehingga peran strategis dalam isu sensitif masih lebih banyak dijalankan oleh Kabiro Kemahasiswaan.

¹¹ Artis, "Strategi Komunikasi Public Relations," *Sosial Budaya* 8, no. 02 (2017): 184-97, <https://books.google.co.id/books?id=krbWDgAAQBAJ&lpg=PR6&dq=komunikasi&lr&pg=PR1#v=onepage&q=komunikasi&f=true>.

¹² Yusri M Daud, "Analisis Bibliometrik : Peran Humas Perguruan Tinggi Di Era Ini , Humas Perguruan Tinggi Memiliki Peran Krusial Dalam Membangun," 14, no. 01 (2025): 20-35.

Uraian ini menjadi pintu masuk untuk memahami bahwa meskipun Humas di perguruan tinggi telah aktif dalam fungsi teknis komunikasi, namun penguatan peran strategis tetap menjadi kebutuhan mendesak agar Humas dapat berperan lebih efektif, bukan hanya sebagai penyampai informasi, tetapi juga sebagai penentu kebijakan komunikasi dan fasilitator penyelesaian masalah.

2. Universitas Muhammadiyah Bangka Belitung

Hasil penelitian mengenai peran Humas di Universitas Muhammadiyah Bangka Belitung (Unmuh Babel) menunjukkan bahwa fungsi utama yang dijalankan lebih menekankan pada peran sebagai *communication facilitator*. Dalam perspektif teori peran humas yang dikemukakan oleh Dozier dan Broom¹³, *communication facilitator* merujuk pada posisi humas sebagai jembatan komunikasi yang menghubungkan organisasi dengan publiknya. Peran ini menekankan pada kemampuan humas untuk membangun iklim komunikasi yang sehat, menjaga keterbukaan informasi, serta menciptakan hubungan harmonis antara pihak manajemen dengan stakeholder.

Dalam konteks Unmuh Babel, peran ini terlihat nyata melalui dukungan humas terhadap berbagai program pembentukan karakter civitas akademika. Humas secara aktif melakukan publikasi kegiatan religius seperti Baitul Arkom, pengajian, dan kegiatan keagamaan lainnya yang menjadi ciri khas kampus berbasis Islam. Kegiatan tersebut tidak hanya dipublikasikan secara internal kepada mahasiswa dan dosen, tetapi juga diperluas melalui media sosial dan kanal komunikasi eksternal untuk memperkuat citra kampus sebagai institusi yang religius, berakhlak mulia, dan berorientasi pada nilai-nilai Islami. Dengan demikian, peran humas sebagai *communication facilitator* tampak konsisten dalam menjaga alur komunikasi serta mempertegas identitas kelembagaan. Dalam konteks pencegahan pelecehan seksual, peran humas sebagai *communication facilitator* seharusnya tidak hanya berfokus pada publikasi kegiatan religius, tetapi juga dapat diarahkan pada komunikasi edukatif yang menanamkan nilai-nilai kesetaraan, penghormatan terhadap martabat manusia, dan pentingnya mekanisme pelaporan yang aman. Dengan demikian, fungsi fasilitasi komunikasi dapat menjadi bagian dari strategi preventif kampus dalam membangun budaya anti-kekerasan.

¹³ Dozier and Broom, "Evolution of the Manager Role in Public Relations Practice."

Namun demikian, dalam isu yang lebih sensitif dan krusial seperti kasus pelecehan seksual, hasil penelitian menunjukkan bahwa humas belum berperan sebagai pengambil keputusan strategis. Peran sebagai *expert prescriber*, yaitu aktor yang mampu memberikan masukan kebijakan dan strategi dalam menangani krisis, lebih banyak dijalankan oleh Lembaga Studi dan Pengembangan Ilmu Keislaman (LSPIK). Hal ini memperlihatkan adanya pembagian peran yang cukup jelas di Unmuh Babel: humas lebih banyak mendukung aspek komunikasi eksternal dan menjaga citra positif lembaga, sementara LSPIK mengambil alih fungsi normatif dan kebijakan strategis terkait isu-isu yang menyangkut moralitas serta perlindungan civitas akademika.

Fenomena ini sekaligus menegaskan bahwa peran humas di Unmuh Babel masih berada pada posisi pendukung (*supporting role*), bukan pada posisi penentu (*decision-making role*). Hal ini sesuai dengan temuan penelitian Dozier yang menyebutkan bahwa dalam banyak organisasi, humas kerap ditempatkan hanya sebagai pelaksana teknis atau fasilitator komunikasi, sementara keputusan strategis ditentukan oleh unit lain yang dianggap lebih memiliki otoritas substansial. Dalam kasus ini, otoritas tersebut berada pada LSPIK yang dinilai lebih relevan untuk menangani persoalan sensitif bernuansa agama dan moral.

Dengan demikian, hasil penelitian ini memberikan gambaran bahwa Unmuh Babel menempatkan humas pada fungsi *communication facilitator* yang sangat penting dalam membangun iklim komunikasi positif dan menjaga citra kampus. Akan tetapi, keterbatasan peran humas dalam isu krisis, khususnya kasus pelecehan seksual, juga membuka ruang refleksi bagi pengembangan fungsi humas ke arah yang lebih strategis. Humas seharusnya tidak hanya menjadi penyampai pesan atau penjaga citra, tetapi juga perlu dilibatkan dalam perumusan kebijakan komunikasi yang berkaitan langsung dengan perlindungan civitas akademika. Hal ini penting agar humas dapat menjalankan peran yang lebih komprehensif: tidak hanya sebagai fasilitator komunikasi, melainkan juga sebagai *problem solving facilitator* maupun *expert prescriber* sesuai kerangka teori peran humas.

3. STIE IBEK Bangka Belitung

Penelitian mengenai peran humas di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) IBEK memperlihatkan fenomena menarik terkait posisi dan fungsi humas dalam struktur organisasi perguruan tinggi. Berdasarkan temuan lapangan, humas yang ada di kampus ini

dijalankan oleh bagian pemasaran, sehingga orientasi utamanya lebih menekankan pada fungsi *communication technician*. Dalam kerangka teori Dozier dan Broom¹⁴, *communication technician* merujuk pada peran humas yang lebih bersifat teknis, yakni menyusun publikasi, membuat konten promosi, menyiapkan press release, dan mengelola media informasi tanpa terlibat dalam perumusan kebijakan strategis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa fungsi humas di STIE IBEK benar-benar ditekankan pada aspek promosi institusi, baik dalam bentuk publikasi kegiatan maupun penyebaran informasi terkait citra positif kampus. Fungsi ini memang penting, karena komunikasi publik yang efektif dapat meningkatkan visibilitas dan reputasi lembaga. Namun, jika dilihat dari sudut pandang keilmuan kehumasan, peran yang hanya terfokus pada ranah teknis cenderung mengabaikan fungsi strategis yang seharusnya melekat pada posisi humas, terutama dalam isu-isu yang bersifat krusial dan menyangkut perlindungan civitas akademika, seperti kasus pelecehan seksual.

Fokus humas yang semata-mata pada publikasi dan promosi menyebabkan absennya komunikasi edukatif yang berfungsi mencegah munculnya perilaku tidak etis di lingkungan kampus. Padahal, melalui strategi komunikasi internal yang tepat, humas dapat menjadi sarana penyebaran nilai-nilai kesetaraan, etika, dan penghormatan terhadap martabat manusia di ruang akademik.

Ketiadaan keterlibatan humas dalam perencanaan kebijakan pencegahan pelecehan seksual menunjukkan bahwa peran humas sebagai *problem solving facilitator* belum berjalan. Dalam teori Dozier dan Broom, *problem solving facilitator* seharusnya menjadikan humas sebagai aktor yang turut serta dalam identifikasi masalah, penyusunan solusi, hingga implementasi kebijakan yang mampu mencegah krisis komunikasi maupun krisis kelembagaan. Namun, di STIE IBEK, fungsi ini sepenuhnya belum diaktifkan. Hal ini berimplikasi pada keterbatasan humas dalam menjalankan peran strategisnya, karena segala bentuk kebijakan kampus terkait isu sensitif tidak melalui peran humas, melainkan ditangani unit lain yang dianggap lebih relevan.

Kondisi ini dapat dipahami sebagai refleksi dari orientasi kelembagaan STIE IBEK yang masih menempatkan humas sebatas unit promosi, bukan sebagai bagian integral dari

¹⁴ Dozier and Broom.

manajemen strategis. Hal ini sejalan dengan temuan penelitian Dozier¹⁵, yang menyatakan bahwa dalam banyak organisasi, humas sering kali diposisikan hanya sebagai pelaksana teknis, bukan sebagai pengambil keputusan. Dengan kata lain, humas di STIE IBEK berperan penting dalam membangun citra dan promosi lembaga, tetapi belum dianggap sebagai aktor kunci dalam pencegahan maupun penanganan isu pelecehan seksual yang berpotensi mencederai citra kampus.

Temuan ini menjadi catatan penting bagi pengembangan peran humas di perguruan tinggi. Dalam era keterbukaan informasi dan meningkatnya kasus pelecehan seksual di berbagai lembaga pendidikan, humas tidak dapat terus-menerus ditempatkan hanya pada fungsi teknis. Diperlukan penguatan kapasitas humas agar dapat memainkan peran sebagai *problem solving facilitator* dan bahkan *expert prescriber*, yakni aktor yang memberikan masukan kebijakan komunikasi kepada pimpinan. Hanya dengan demikian, humas dapat benar-benar menjalankan fungsi ganda: menjaga citra positif lembaga sekaligus memastikan perlindungan terhadap civitas akademika melalui strategi komunikasi yang proaktif, preventif, dan responsif.

4. STIKES Citra Delima

Hasil penelitian mengenai peran Humas di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKES) Citra Delima menunjukkan adanya kecenderungan humas lebih berperan pada dua ranah utama yang diuraikan oleh Dozier dan Broom¹⁶, yakni sebagai *communication facilitator* dan *communication technician*. Sebagai *communication facilitator*, humas menjalankan fungsi jembatan komunikasi antara pihak manajemen kampus dengan civitas akademika. Hal ini tampak dalam upaya Humas menyosialisasikan aturan dasar yang berlaku, seperti kode etik berpakaian, tata tertib mahasiswa, dan pembatasan waktu bimbingan. Melalui peran ini, humas berusaha menjaga keteraturan perilaku mahasiswa sekaligus memastikan adanya pemahaman yang seragam mengenai norma dan aturan kampus.

Namun demikian, penelitian juga menunjukkan bahwa peran humas dalam kapasitas strategis masih terbatas. Dalam teori Dozier dan Broom, humas idealnya juga memainkan

¹⁵ Dozier and Broom.

¹⁶ Dozier and Broom.

peran sebagai *problem solving facilitator*, yakni aktor yang turut serta dalam mendiagnosis masalah, mengidentifikasi potensi krisis, serta menyusun strategi komunikasi yang dapat mencegah terjadinya persoalan serius seperti pelecehan seksual di lingkungan kampus. Di STIKES Citra Delima, fungsi ini belum berjalan optimal karena kebijakan pencegahan pelecehan seksual belum diformalkan dalam regulasi kampus yang jelas. Dengan demikian, humas belum benar-benar dilibatkan dalam perencanaan maupun pengambilan keputusan strategis terkait isu sensitif tersebut.

Selain itu, temuan penelitian memperlihatkan bahwa humas STIKES Citra Delima masih lebih banyak menghabiskan energinya pada fungsi *communication technician*. Fungsi ini diwujudkan melalui aktivitas promosi kampus di berbagai media, baik media sosial maupun media cetak, untuk meningkatkan citra positif dan daya tarik lembaga di mata publik. Aktivitas ini memang penting dalam konteks kompetisi perguruan tinggi swasta, namun jika hanya terfokus pada ranah teknis, humas akan sulit berkembang menjadi aktor strategis yang mampu mengantisipasi isu-isu kritis yang berpotensi merusak reputasi institusi.

Dengan demikian, hasil penelitian ini memberikan dua catatan penting. Pertama, Humas STIKES Citra Delima sudah menunjukkan peran fungsional sebagai fasilitator komunikasi internal dengan membantu menyosialisasikan aturan dasar mahasiswa. Kedua, peran humas masih jauh dari fungsi strategis, khususnya sebagai *problem solving facilitator* maupun *expert prescriber*. Hal ini menunjukkan bahwa struktur organisasi dan kebijakan kampus belum memberi ruang optimal bagi humas untuk berkontribusi dalam isu krusial seperti pencegahan pelecehan seksual.

Secara akademis, temuan ini memperkuat argumen Dozier bahwa posisi humas dalam banyak organisasi pendidikan sering kali dipersempit pada fungsi teknis dan promosi semata, sementara fungsi strategisnya kurang diberdayakan. Oleh karena itu, penelitian ini menegaskan perlunya reposisi humas di STIKES Citra Delima agar tidak sekadar menjadi penyampai informasi, tetapi juga aktor kunci dalam merumuskan kebijakan komunikasi strategis yang mampu melindungi civitas akademika sekaligus memperkuat citra institusi secara berkelanjutan.

5. STIE Pertiba

Hasil penelitian mengenai peran Humas di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pertiba memberikan gambaran penting tentang bagaimana fungsi kehumasan dapat dijalankan secara lebih komprehensif dan strategis, terutama ketika lembaga menghadapi isu krisis yang sangat sensitif seperti kasus pelecehan seksual. Berdasarkan kerangka teori Dozier dan Broom, humas di Pertiba tidak lagi terbatas pada peran *communication technician* atau sekadar fasilitator komunikasi, melainkan telah tampil sebagai *problem solving facilitator* sekaligus *expert prescriber*.

Peran humas sebagai *problem solving facilitator* tercermin jelas dalam keterlibatannya menangani kasus pelecehan yang pernah terjadi di lingkungan kampus. Humas berperan aktif dalam proses komunikasi krisis dengan menyampaikan sikap tegas institusi kepada publik, yaitu menegaskan bahwa pelaku diberhentikan dari statusnya sebagai mahasiswa. Langkah ini menunjukkan bahwa humas tidak hanya menjalankan fungsi teknis dalam menyebarkan informasi, melainkan juga menjadi bagian dari mekanisme penyelesaian masalah organisasi. Humas di Pertiba berperan menjaga agar pesan yang disampaikan kepada publik selaras dengan nilai moral dan prinsip keadilan, sekaligus melindungi reputasi lembaga dari potensi kerusakan citra yang lebih besar.

Lebih jauh, humas di Pertiba juga memainkan peran sebagai *expert prescriber*, yakni aktor yang turut memberikan masukan kebijakan komunikasi dan arah strategis organisasi dalam menangani isu krisis. Peran ini tampak nyata dalam dukungan humas terhadap pembentukan Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (Satgas PPKS) di lingkungan kampus. Keterlibatan humas dalam proses pembentukan Satgas PPKS menegaskan bahwa fungsi humas telah melampaui sekadar teknis dan operasional, menuju peran strategis yang berkontribusi langsung terhadap pengambilan kebijakan kelembagaan. Temuan ini sejalan dengan pandangan Dozier yang menyatakan bahwa humas yang ideal adalah humas yang memiliki akses terhadap pengambilan keputusan, sehingga mampu memberi nilai tambah bagi organisasi. Humas di Pertiba tidak hanya hadir sebagai pendukung citra, tetapi juga sebagai bagian integral dari manajemen krisis organisasi. Hal ini menjadi contoh nyata bagaimana perguruan tinggi dapat memposisikan humas sebagai aktor strategis yang ikut menjaga keberlangsungan organisasi melalui komunikasi yang tepat, tegas, dan berbasis pada kepentingan perlindungan civitas akademika.

Dengan demikian, penelitian ini memperlihatkan bahwa Humas STIE Pertiba berhasil menjalankan dua peran strategis sekaligus: menyelesaikan masalah (*problem solving*) dan merumuskan arah kebijakan komunikasi (*expert prescribing*). Peran ganda ini tidak hanya berdampak pada penyelesaian kasus pelecehan secara tuntas, tetapi juga memperkuat citra kampus sebagai institusi yang responsif, tegas, dan peduli terhadap perlindungan mahasiswa. Dalam kerangka akademis, temuan ini menjadi rujukan penting bagi perguruan tinggi lain untuk mulai menggeser orientasi humas dari sekadar teknis ke arah yang lebih strategis, sehingga fungsi humas dapat benar-benar menjadi garda terdepan dalam menjaga reputasi sekaligus mewujudkan tata kelola kelembagaan yang sehat dan berkeadilan.

6. STISIPOL Pahlawan 12

Penelitian mengenai peran humas di salah satu perguruan tinggi yang belum memiliki unit humas formal menunjukkan dinamika kelembagaan yang cukup unik dalam konteks komunikasi organisasi. Tidak adanya struktur humas yang berdiri sendiri membuat fungsi kehumasan dijalankan langsung oleh pimpinan kampus. Konsekuensinya, peran humas tidak dapat dijalankan secara optimal sesuai dengan spektrum penuh yang dijelaskan dalam teori Dozier dan Broom, melainkan hanya terbatas pada fungsi teknis dan fasilitasi komunikasi.

Dalam praktiknya, peran humas di kampus ini lebih banyak diwujudkan dalam bentuk *communication technician* dan *communication facilitator*. Sebagai *communication technician*, pimpinan kampus merangkap peran humas dengan menjalankan tugas teknis seperti menyampaikan aturan-aturan dasar kepada mahasiswa, mempublikasikan tata tertib, dan mengatur mekanisme komunikasi sehari-hari. Sebagai *communication facilitator*, pimpinan berupaya menjaga keteraturan perilaku civitas akademika dengan menekankan sosialisasi kode etik berpakaian, memisahkan fasilitas mahasiswa laki-laki dan perempuan, serta mengatur mekanisme bimbingan agar tetap sesuai norma yang berlaku. Upaya-upaya ini penting dalam menjaga komunikasi internal dan mendukung stabilitas tata kelola kehidupan kampus.

Namun, penelitian ini juga menegaskan adanya keterbatasan serius. Fungsi humas sebagai *expert prescriber*, yaitu sebagai aktor strategis yang memberikan masukan kebijakan komunikasi, belum tampak di kampus ini. Humas dalam pengertian strategis seharusnya

mampu berperan dalam mendiagnosis persoalan yang berpotensi menjadi krisis, menyusun strategi komunikasi untuk mencegah risiko reputasi, serta menjadi bagian dari proses pengambilan keputusan penting lembaga. Tidak adanya unit humas formal dan keterlibatan yang terstruktur membuat peran strategis tersebut absen, sehingga aspek perumusan kebijakan komunikasi kampus belum sepenuhnya terintegrasi dengan perspektif kehumasan.

Temuan ini memperlihatkan bahwa peran humas di kampus masih bersifat minimalis, terbatas pada fungsi teknis dan fasilitasi. Padahal, dalam konteks perguruan tinggi yang menghadapi tantangan kompleks, mulai dari kompetisi antar-lembaga hingga isu-isu sensitif seperti pelecehan seksual, keberadaan humas yang kuat dan strategis menjadi kebutuhan mendesak. Menurut Dozier, organisasi yang menempatkan humas hanya pada ranah teknis akan kesulitan dalam menghadapi krisis, karena humas tidak dilibatkan dalam penyusunan kebijakan. Oleh sebab itu, keberadaan unit humas formal dengan kewenangan strategis sangat penting agar fungsi humas tidak sekadar bersifat operasional, tetapi juga mampu memberi kontribusi nyata dalam menjaga reputasi dan legitimasi kelembagaan.

Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa absennya unit humas formal berimplikasi pada keterbatasan fungsi humas di perguruan tinggi ini. Peran humas yang dijalankan pimpinan memang penting dalam konteks teknis dan fasilitasi, tetapi belum memadai untuk menghadapi tantangan strategis organisasi. Oleh karena itu, ke depan diperlukan penguatan kelembagaan humas agar dapat mengemban peran lebih luas, tidak hanya sebagai *communication technician* atau *facilitator*, tetapi juga sebagai *problem solving facilitator* dan *expert prescriber*. Dengan begitu, perguruan tinggi dapat lebih siap menghadapi tantangan komunikasi publik sekaligus memastikan perlindungan civitas akademika dari isu-isu krusial yang berpotensi mengganggu reputasi institusi.

7. Polman Negeri Babel

Penelitian mengenai peran Humas di Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung (Polman Negeri Babel) menunjukkan gambaran paling komprehensif dibandingkan dengan perguruan tinggi lain dalam lingkup penelitian ini. Dalam kerangka teori Dozier dan

Broom¹⁷, humas di Polman Negeri Babel tidak hanya hadir dalam fungsi teknis, tetapi juga telah mengisi seluruh spektrum peran humas yang meliputi *communication technician*, *communication facilitator*, *problem solving facilitator*, hingga *expert prescriber*. Temuan ini mengindikasikan bahwa Polman Negeri Babel memiliki kesadaran kelembagaan yang tinggi terhadap pentingnya humas sebagai garda depan komunikasi, baik dalam konteks pengelolaan citra maupun penanganan isu strategis seperti pencegahan pelecehan seksual di lingkungan perguruan tinggi.

Sebagai *communication facilitator*, humas di Polman Negeri Babel membuka saluran komunikasi dua arah yang efektif melalui penyediaan kanal pelaporan online bagi civitas akademika. Saluran ini berfungsi tidak hanya sebagai media pelaporan kasus kekerasan seksual, tetapi juga sebagai sarana membangun iklim komunikasi yang transparan, partisipatif, dan responsif terhadap kebutuhan mahasiswa maupun dosen. Fungsi ini sangat relevan dengan esensi humas modern, yaitu menjembatani hubungan antara organisasi dengan publik internal secara dialogis.

Selain itu, humas juga menjalankan peran sebagai *communication technician* dengan mengelola berbagai media komunikasi yang digunakan untuk sosialisasi program dan kebijakan kampus. Misalnya, publikasi intensif mengenai keberadaan dan peran Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) melalui media sosial resmi, website kampus, maupun grup komunikasi daring. Aktivitas ini bukan hanya mendiseminasikan informasi, tetapi juga membangun kesadaran kolektif civitas akademika akan pentingnya budaya kampus yang aman, beretika, dan bebas dari pelecehan seksual.

Peran humas sebagai *problem solving facilitator* juga tampak nyata dalam keterlibatannya mendukung evaluasi kebijakan melalui survei yang melibatkan civitas akademika. Survei ini berfungsi sebagai instrumen diagnostik untuk menilai sejauh mana kebijakan dan sosialisasi pencegahan pelecehan seksual berjalan efektif di lingkungan kampus. Dengan demikian, humas tidak hanya berfungsi sebagai penyampai informasi, melainkan juga sebagai aktor yang menganalisis situasi, membaca potensi masalah, dan menyampaikan hasil evaluasi sebagai bahan pertimbangan strategis bagi manajemen.

¹⁷ Dozier and Broom.

Lebih penting lagi, humas di Polman Negeri Babel sudah sampai pada peran sebagai *expert prescriber*. Dalam kapasitas ini, humas memberikan masukan langsung kepada pimpinan mengenai strategi komunikasi krisis, terutama ketika lembaga menghadapi isu-isu sensitif yang berpotensi merusak citra institusi. Peran ini menempatkan humas sebagai mitra strategis pimpinan, bukan sekadar pelaksana teknis. Dengan kata lain, humas di Polman Negeri Babel telah menunjukkan fungsi ideal sebagaimana digambarkan Dozier, yakni humas yang memiliki akses pada proses pengambilan keputusan sehingga mampu memastikan strategi komunikasi lembaga berjalan efektif, terukur, dan adaptif terhadap dinamika publik.

Secara akademis, temuan ini memperlihatkan bahwa Polman Negeri Babel menjadi model penerapan peran humas yang paling lengkap dan strategis dalam konteks perguruan tinggi di Bangka Belitung. Humas tidak hanya mengelola komunikasi rutin, tetapi juga memainkan peran kunci dalam membangun sistem pencegahan kekerasan seksual, menjaga hubungan timbal balik dengan civitas akademika, serta melindungi citra lembaga melalui strategi komunikasi krisis. Penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam memperkuat pemahaman bahwa humas di perguruan tinggi bukan sekadar unit promosi, melainkan aktor strategis yang harus diberdayakan untuk mendukung tata kelola kampus yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada perlindungan civitas akademika.

D. Kesimpulan dan Rekomendasi

Hasil penelitian mengenai peran humas di berbagai perguruan tinggi di Bangka Belitung memperlihatkan variasi yang signifikan dalam tingkat kedewasaan kelembagaan dan keterlibatan strategis humas. Berdasarkan kerangka teori peran humas Dozier dan Broom, ditemukan bahwa tidak semua perguruan tinggi mampu menghadirkan humas dalam spektrum peran yang lengkap.

Pertama, terdapat perguruan tinggi yang peran humasnya masih bersifat minimalis, seperti di Universitas Atma Luhur dan beberapa kampus yang tidak memiliki unit humas formal. Pada kasus ini, humas lebih dominan menjalankan fungsi sebagai *communication technician* dan *communication facilitator*, misalnya melalui penyebaran informasi aturan, pengelolaan media sosial, serta penyampaian tata tertib kampus. Namun, peran strategis sebagai *expert prescriber* maupun *problem solving facilitator* belum tampak signifikan. Ketiadaan peran

strategis ini erat kaitannya dengan belum adanya kasus serius yang menuntut keterlibatan humas dalam komunikasi krisis, serta belum adanya kebijakan formal terkait pencegahan dan penanganan kekerasan seksual.

Kedua, terdapat perguruan tinggi yang mulai memperlihatkan peran humas yang lebih maju, meskipun belum sepenuhnya lengkap. Misalnya di STIKES Citra Delima dan STIE IBEK, humas menjalankan fungsi fasilitasi komunikasi dan teknis, tetapi masih minim dalam aspek *problem solving facilitator* maupun *expert prescriber*. Hal ini memperlihatkan bahwa humas di kampus tersebut berperan lebih banyak dalam ranah operasional dan sosialisasi, sementara keterlibatan dalam ranah strategis kebijakan masih sangat terbatas.

Ketiga, penelitian menemukan perguruan tinggi yang sudah memperlihatkan peran humas sebagai aktor strategis, seperti STIE Pertiba. Dalam menghadapi kasus pelecehan seksual, humas di kampus ini tampil tidak hanya sebagai *problem solving facilitator*, tetapi juga sebagai *expert prescriber*. Humas ikut serta dalam komunikasi krisis dengan menyampaikan sikap tegas kampus, mendukung pembentukan Satgas PPKS, dan menjaga citra lembaga. Temuan ini menunjukkan bahwa ketika menghadapi isu serius, humas dapat bertransformasi dari sekadar pelaksana teknis menjadi penentu arah strategi komunikasi organisasi.

Keempat, Polman Negeri Bangka Belitung menjadi contoh paling ideal dalam penelitian ini. Humas di Polman telah menjalankan seluruh spektrum peran: *communication technician*, *communication facilitator*, *problem solving facilitator*, hingga *expert prescriber*. Keberadaan saluran pelaporan online, publikasi sosialisasi Satgas PPKS, pelaksanaan survei evaluasi, hingga keterlibatan dalam perumusan strategi komunikasi krisis, menunjukkan bahwa humas di kampus ini sudah diakui sebagai mitra strategis pimpinan dalam menjaga reputasi dan memastikan perlindungan civitas akademika. Polman Negeri Babel dengan demikian dapat dijadikan model penerapan peran humas yang komprehensif di perguruan tinggi.

Secara keseluruhan, penelitian ini menyimpulkan bahwa peran humas di perguruan tinggi di Bangka Belitung berada pada spektrum yang beragam, mulai dari sekadar teknis hingga strategis. Faktor yang membedakan terletak pada: (1) keberadaan unit humas formal dengan struktur yang jelas, (2) kesiapan kebijakan institusi dalam menghadapi isu-isu krisis, dan (3) pengakuan pimpinan terhadap posisi humas sebagai aktor strategis dalam pengambilan keputusan. Perguruan tinggi yang menempatkan humas hanya pada ranah

teknis cenderung kurang siap menghadapi tantangan krisis, sedangkan kampus yang memberi ruang humas untuk berperan strategis menunjukkan kapasitas komunikasi yang lebih tangguh.

Dengan demikian, rekomendasi dari penelitian ini adalah perlunya penguatan fungsi humas di seluruh perguruan tinggi, tidak hanya sebatas sebagai teknisi komunikasi, tetapi juga sebagai mitra strategis dalam tata kelola organisasi. Hal ini menjadi penting untuk memastikan keberlanjutan reputasi, efektivitas komunikasi publik, serta terciptanya lingkungan akademik yang aman, transparan, dan akuntabel.

DAFTAR PUSTAKA

- Artis. "Strategi Komunikasi Public Relations." *Sosial Budaya* 8, no. 02 (2017): 184–97.
<https://books.google.co.id/books?id=krbWDgAAQBAJ&lpg=PR6&dq=komunikasi&lr&pg=PR1#v=onepage&q=komunikasi&f=true>.
- Cutlip, Center, and Glenn M. Broom. *Effective Public Relations*, n.d.
- Daud, Yusri M. "Analisis Bibliometrik : Peran Humas Perguruan Tinggi di Era Ini , Humas Perguruan Tinggi Memiliki Peran Krusial dalam Membangun ," 14, no. 01 (2025): 20–35.
- Dozier, David M., and Glen M. Broom. "Evolution of the Manager Role in Public Relations Practice." *Journal of Public Relations Research* 7, no. 1 (1995): 3–26.
https://doi.org/10.1207/s1532754xjpr0701_02.
- Maulana, Moh Hasan Afini. *Manajemen Humas pada Lembaga Pendidikan Pesantren*. ITQAN : *Jurnal Ilmu-Ilmu Kependidikan*. Vol. 10, 2019.
<https://doi.org/10.47766/itqan.v10i1.282>.
- Morissan. *Manajemen Public Relations: Strategi Menjadi Humas Profesional*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.
- Nuansa, Aktualisasi, dan Ilmu Dakwah. "Peran dan Strategi Humas dalam Pembentukan Citra Perguruan Tinggi Islam" 15 (2016): 317–38.
- Rini, Kurnia Setiyo, Sugeng Rusmiwari, and Herru Prasetya Widodo. "Peran Humas Dalam Meningkatkan Citra Universitas Tribhuwana Tunggaladewi." *JISIP: Jurnal Ilmu Sosial Dan*

Ilmu Politik 6, no. 1 (2017): 34–37. www.publikasi.unitri.ac.id.

WEEKES, L. R. *Professional Public Relations. Journal of the National Medical Association*. Vol. 46, 1954.